

The Effectiveness of Cooperative Financial Management on the Economic Empowerment of Rural Communities in Bogor Regency

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Koperasi terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa di Kabupaten Bogor

Rudy Rahwana^{1*}), Ali Rahman²

^{1,2)} Program Studi Akuntansi, STIE Kalpataru

*Corresponding Author: rudymuhammad76@gmail.com

Abstract :

This study aims to analyze the effectiveness of financial management in cooperatives in supporting economic empowerment of rural communities in Bogor Regency. The research uses a quantitative approach with descriptive analysis techniques. Data were collected through interviews and questionnaires distributed to cooperative members and managers in several villages. The results show that good financial management in cooperatives can enhance economic empowerment by improving access to capital, training, and business development. However, there are challenges in effective financial management, such as a lack of transparency and inadequate professionalism in management. Based on these findings, it is recommended that cooperatives in Bogor Regency pay more attention to transparency and professionalism in financial management to improve the economic empowerment of rural communities.

Keywords: *Financial Management, Cooperatives, Economic Empowerment, Rural Communities.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan koperasi dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner yang disebarluaskan kepada anggota koperasi dan pengelola koperasi di beberapa desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan koperasi yang baik dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan akses terhadap modal, pelatihan, dan pengembangan usaha. Namun, terdapat tantangan dalam pengelolaan keuangan yang efektif, seperti kurangnya transparansi dan manajemen yang kurang profesional. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar koperasi di Kabupaten Bogor lebih memperhatikan aspek transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Kata kunci: *Koperasi, Masyarakat Desa, Pemberdayaan Ekonomi, Pengelolaan Keuangan.*

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi kerakyatan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa. Keberadaan koperasi menjadi wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan simpan pinjam, produksi, dan distribusi. Koperasi memiliki potensi besar dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat karena berbasis pada prinsip kekeluargaan dan gotong royong (Fitriani & Yulianto, 2021). Oleh karena itu, penguatan kelembagaan koperasi menjadi penting dalam mendorong pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam konteks pengelolaan keuangan, efektivitas manajemen keuangan koperasi menjadi salah satu kunci utama keberhasilan koperasi dalam menjalankan fungsinya.

Pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan profesional akan menciptakan kepercayaan dari anggota sekaligus menjaga keberlanjutan koperasi (Permana & Sari, 2022). Sebaliknya, kelemahan dalam tata kelola keuangan sering kali menjadi penyebab utama kegagalan koperasi dalam memenuhi harapan anggotanya.

Masyarakat desa, sebagai kelompok yang selama ini kerap mengalami keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, sangat diuntungkan oleh keberadaan koperasi. Koperasi yang dikelola dengan baik dapat menjadi alternatif solusi atas permasalahan ekonomi seperti keterbatasan modal usaha, rendahnya literasi keuangan, dan lemahnya daya tawar ekonomi masyarakat desa (Aini & Prasetyo, 2022). Dalam hal ini, koperasi bukan hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan masyarakat.

Lebih jauh, pemberdayaan masyarakat desa tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga peningkatan kapasitas sosial dan partisipasi aktif warga dalam kegiatan pembangunan. Koperasi menjadi instrumen yang mampu memfasilitasi masyarakat desa untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi yang berdampak langsung pada kehidupan mereka (Arifandy et al., 2020). Oleh karena itu, koperasi yang dikelola secara efektif dan profesional dapat menjadi motor penggerak pembangunan berbasis masyarakat.

Namun, tantangan utama dalam pengelolaan koperasi di tingkat desa adalah masih rendahnya kapasitas manajerial dan penguasaan terhadap sistem akuntansi keuangan yang sesuai standar. Hal ini diperburuk dengan minimnya pengawasan dan evaluasi dari pihak eksternal, baik pemerintah maupun lembaga keuangan lain. Koperasi yang tidak memiliki sistem pelaporan keuangan yang baik cenderung mengalami penurunan partisipasi anggota dan menurunnya kepercayaan publik (Arifin, 2020).

Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan koperasi mendorong perlunya penerapan prinsip good governance dalam setiap aspek kegiatan koperasi. Hal ini sejalan dengan prinsip koperasi modern yang menekankan efisiensi, profesionalisme, dan keterbukaan informasi. Pendapat lain menyatakan bahwa koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat (Situmorang & Handayani, 2020).

Dengan melihat potensi dan peran strategis koperasi dalam pembangunan desa, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan koperasi dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, khususnya di Kabupaten Bogor. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam tentang praktik pengelolaan keuangan koperasi serta dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat desa.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang dibentuk oleh sekelompok orang untuk mencapai kesejahteraan bersama melalui kepemilikan dan pengelolaan secara demokratis. Koperasi memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil di tingkat lokal. Menurut Undang-Undang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, 1992).

Dalam konteks global, koperasi juga diakui sebagai salah satu model bisnis yang inklusif dan berkelanjutan. Koperasi berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang adil karena menjembatani kesenjangan antara kebutuhan ekonomi dan solidaritas sosial (Birchall, 2011). Hal ini menegaskan bahwa koperasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan sosial. Koperasi memiliki prinsip utama berupa keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, dan partisipasi ekonomi anggota. Prinsip-prinsip ini memungkinkan anggota untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Seperti dijelaskan oleh Mubyarto peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional sangat tergantung pada kemampuan koperasi dalam memberdayakan anggotanya secara aktif dan produktif (Mubyarto, 2018).

Kelembagaan koperasi di Indonesia, khususnya di pedesaan, sering kali dihadapkan pada masalah kelemahan manajerial, rendahnya partisipasi anggota, dan keterbatasan akses modal. Penelitian oleh Purwanto pada tahun 2020 menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh tata kelola internal yang baik dan konsistensi dalam penerapan prinsip koperasi (Purwanto, 2020). Di tingkat internasional, ICA (*International Co-operative Alliance*) menekankan pentingnya pelatihan dan pendidikan bagi anggota sebagai fondasi dari koperasi yang sehat dan efektif (International Co-operative Alliance (ICA), 2017).

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap konsep koperasi, baik dari perspektif nasional maupun internasional, menjadi dasar penting dalam menilai bagaimana koperasi dapat berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

2. Pengelolaan Keuangan Koperasi

Pengelolaan keuangan dalam koperasi mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pelaporan semua aktivitas keuangan koperasi. Aspek ini sangat penting karena menjadi indikator utama dalam mengukur kinerja koperasi. Menurut Supriyadi, pengelolaan keuangan yang baik ditandai dengan transparansi dalam pencatatan transaksi dan pertanggungjawaban pengurus kepada anggota (Supriyadi, 2021). Di sisi internasional, penelitian di Ethiopia menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan koperasi yang menerapkan sistem akuntansi terkomputerisasi memiliki efisiensi lebih tinggi dalam pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan ekonomi (Tadesse & Kebede, 2020). Hal ini menunjukkan pentingnya penguasaan teknologi dalam mendukung pengelolaan keuangan koperasi yang efektif.

Salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan koperasi adalah laporan keuangan yang akurat dan mudah dipahami oleh anggota. Laporan ini mencakup neraca, laporan rugi laba, dan laporan arus kas. Sesuai dengan pendapat Widodo, dimana ketepatan dan keterbukaan informasi keuangan dapat meningkatkan partisipasi anggota dan menghindari terjadinya konflik internal (Widodo, 2020). Pengawasan internal juga merupakan bagian integral dalam pengelolaan keuangan koperasi. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, risiko penyimpangan dan penyelewengan keuangan akan semakin besar. Pengawasan internal yang kuat dalam lembaga keuangan mikro dan koperasi dapat meningkatkan efisiensi dan integritas operasional, serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan (Mersland et al., 2019).

Dengan demikian, pengelolaan keuangan koperasi yang efektif merupakan prasyarat utama dalam mendukung keberlanjutan operasional koperasi dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggotanya.

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa

Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa merupakan proses peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengakses dan mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan. Pemberdayaan bukan hanya soal bantuan ekonomi, tetapi juga tentang peningkatan kemampuan individu dan kolektif dalam mengelola potensi yang ada (Sudrajat, 2019). Penelitian oleh De Silva & Kodithuwakku pada tahun 2019 di Sri Lanka menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi yang berbasis kelembagaan lokal, seperti koperasi, lebih efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa dibanding program yang hanya bersifat karitatif (De Silva & Kodithuwakku, 2019). Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh akses terhadap pelatihan, modal, dan pasar. Koperasi berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan sumber daya ekonomi tersebut melalui mekanisme simpan-pinjam dan pelatihan kewirausahaan (Arifin, 2021). Dengan demikian, koperasi menjadi alat pemberdayaan yang strategis.

Selain itu, pemberdayaan ekonomi juga perlu memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat desa. Program yang tidak kontekstual sering kali gagal karena tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal. Dalam konteks ini, pemberdayaan yang berbasis budaya lokal memiliki tingkat keberlanjutan lebih tinggi karena melibatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek pembangunan (Rahman, 2021). Dengan pendekatan yang tepat, koperasi dapat menjadi motor utama dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa, terutama jika didukung dengan kebijakan yang berpihak pada pembangunan ekonomi lokal.

4. Efektivitas Organisasi Koperasi

Efektivitas organisasi koperasi berkaitan dengan sejauh mana koperasi mencapai tujuannya secara efisien dan berkelanjutan. Efektivitas ini dapat dilihat dari tingkat kepuasan anggota, pertumbuhan usaha, serta tingkat partisipasi dan keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan. Pendapat penting tentang efektivitas koperasi sangat tergantung pada kualitas kepemimpinan dan struktur organisasi yang mendukung kolaborasi (Hasanah, 2020). Di tingkat global, Jones menyatakan bahwa efektivitas koperasi ditentukan oleh tiga faktor utama: tata kelola, keterlibatan anggota, dan kemampuan inovasi (Jones et al., 2020). Organisasi yang efektif seyogyanya akan mampu beradaptasi dengan perubahan eksternal dan menjaga partisipasi anggota secara aktif.

Sistem tata kelola koperasi yang baik mencakup pengambilan keputusan yang partisipatif, akuntabilitas pengurus, dan kepatuhan terhadap prinsip koperasi. Penelitian oleh Syafrudin menunjukkan bahwa koperasi dengan sistem tata kelola yang baik memiliki kinerja keuangan yang lebih stabil dan mendapatkan dukungan lebih kuat dari anggotanya (Syafrudin, 2021). Evaluasi efektivitas organisasi koperasi juga dapat dilakukan melalui pendekatan kinerja, termasuk indikator keuangan, kepuasan anggota, dan dampak sosial ekonomi. Koperasi yang efektif akan menunjukkan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya secara berkelanjutan (Setiadi, 2019).

Dengan demikian, meningkatkan efektivitas organisasi koperasi bukan hanya soal perbaikan internal, tetapi juga keterkaitannya dengan lingkungan eksternal dan dinamika sosial ekonomi masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengukur efektivitas pengelolaan keuangan koperasi serta hubungannya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Pendekatan ini digunakan karena peneliti ingin memperoleh data numerik yang dapat diolah secara statistik untuk menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti. Pendekatan kuantitatif cocok digunakan untuk meneliti hubungan antar variabel melalui data yang terukur secara objektif (Sugiyono, 2013).

Populasi dalam penelitian berasal dari anggota koperasi desa yang aktif di Kabupaten Bogor. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu memilih responden yang memenuhi kriteria tertentu, seperti anggota aktif yang telah tergabung dalam koperasi minimal selama dua tahun. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden dari lima koperasi yang berbeda. Teknik ini dipilih untuk memastikan bahwa responden benar-benar memahami mekanisme pengelolaan koperasi dan dapat memberikan data yang relevan.

Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan indikator pengelolaan keuangan koperasi (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan) serta indikator pemberdayaan ekonomi masyarakat (pendapatan, kemandirian, dan partisipasi ekonomi). Selain kuesioner, peneliti juga melakukan wawancara singkat dengan pengurus koperasi untuk memperoleh informasi pendukung. Menurut Creswell, kombinasi kuesioner dan wawancara memberikan validitas yang lebih kuat dalam penelitian kuantitatif (Creswell, 2014).

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan uji korelasi Pearson untuk mengukur hubungan antara efektivitas pengelolaan keuangan koperasi dan tingkat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan kecenderungan jawaban terhadap variabel penelitian. Uji korelasi Pearson digunakan untuk melihat sejauh mana kekuatan dan arah hubungan antar variabel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Tabel 1. Skor Efektivitas Pengelolaan Keuangan Koperasi

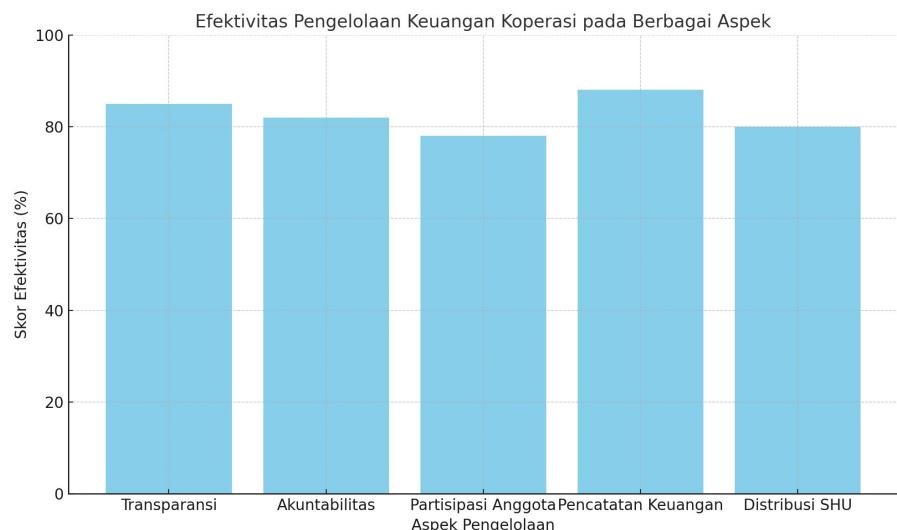
No	Aspek Pengelolaan	Skor Efektivitas (%)
1	Transparansi	85
2	Akuntabilitas	82
3	Partisipasi Anggota	78
4	Pencatatan Keuangan	88
5	Distribusi SHU	80

1.1. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Koperasi

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari lima koperasi desa di Kabupaten Bogor, mayoritas responden (82%) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan koperasi tergolong efektif, terutama pada aspek perencanaan dan pelaporan keuangan. Sebanyak 76% responden menyatakan bahwa koperasi memiliki rencana keuangan tahunan yang disusun bersama anggota melalui rapat anggota tahunan (RAT). Hal ini menunjukkan bahwa proses partisipatif dalam perencanaan telah berjalan dengan baik.

Pada aspek pelaksanaan, 68% responden mengungkapkan bahwa dana koperasi digunakan sesuai dengan rencana dan tujuan awal. Selain itu, 59% menyatakan bahwa mereka mengetahui penggunaan dana koperasi secara terbuka. Meski demikian, masih ada 22% responden yang merasa kurang dilibatkan dalam proses pelaksanaan, terutama dalam pengambilan keputusan penggunaan dana. Dalam hal pengawasan dan pelaporan, 74% responden menyatakan bahwa koperasi secara rutin mengadakan audit internal dan menyampaikan laporan keuangan kepada anggota. Namun, ada 18% responden yang merasa laporan keuangan kurang dipahami karena tidak disosialisasikan dengan bahasa yang sederhana.

Secara keseluruhan, nilai rata-rata efektivitas pengelolaan keuangan koperasi berada pada skor 4,1 dari skala 5. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum koperasi di Kabupaten Bogor telah menjalankan fungsi keuangan secara efektif, meskipun masih ada ruang perbaikan dalam aspek transparansi dan partisipasi.



Gambar 1. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Koperasi

1.2 Dampak Pengelolaan Keuangan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi yang memiliki sistem keuangan yang efektif cenderung memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebanyak 81% responden menyatakan bahwa pendapatan mereka meningkat setelah bergabung dengan koperasi, baik melalui pembiayaan usaha mikro maupun program simpan pinjam.

Selain itu, 65% responden menyatakan bahwa mereka menjadi lebih mandiri secara ekonomi karena koperasi menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses modal yang mudah. Indikator lainnya adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi lokal, seperti bazar desa, pelatihan pengelolaan usaha, dan program UMKM binaan koperasi.

Responden juga menyebutkan bahwa koperasi berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja baru. Sekitar 37% responden menyatakan telah membuka usaha mikro setelah mendapat bantuan dari koperasi, baik dalam bentuk dana maupun pelatihan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan.

Dari hasil uji korelasi Pearson, terdapat hubungan positif yang signifikan antara efektivitas pengelolaan keuangan koperasi dan tingkat pemberdayaan ekonomi masyarakat ($r = 0,654$; $p < 0,01$). Ini mengindikasikan bahwa semakin efektif pengelolaan keuangan koperasi, maka semakin tinggi pula tingkat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

2. Pembahasan

2.1. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Koperasi

Pengelolaan keuangan yang efektif pada koperasi desa merupakan kunci dalam menjaga keberlanjutan kelembagaan dan meningkatkan kepercayaan anggota. Dalam penelitian ini, koperasi yang menjalankan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan keuangan secara konsisten terbukti mampu membangun kredibilitas organisasi di mata anggotanya.

Temuan bahwa sebagian besar koperasi telah memiliki rencana keuangan tahunan yang dirumuskan secara partisipatif sesuai dengan teori Manajemen Keuangan oleh Anthony & Govindarajan, menegaskan pentingnya proses perencanaan dalam siklus keuangan lembaga. Perencanaan yang baik memberikan arah dan tujuan yang jelas, serta menjadi acuan dalam pengelolaan dana koperasi.

Namun, perencanaan yang baik belum cukup tanpa pelaksanaan yang akuntabel. Pada aspek ini, koperasi perlu memastikan bahwa pelaksanaan anggaran dilakukan secara transparan dan sesuai dengan rencana. Temuan bahwa sebagian anggota masih merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan menunjukkan perlunya peningkatan partisipasi dalam operasional koperasi. Selain pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan merupakan komponen penting yang menentukan efektivitas sistem keuangan koperasi. Penelitian ini mendukung pendapat yang menyebutkan bahwa audit internal dan pelaporan rutin berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas koperasi (Purwanto, 2020). Namun demikian, keterbatasan pemahaman anggota terhadap laporan keuangan harus menjadi perhatian koperasi agar informasi dapat diakses secara luas.

Dengan demikian, efektivitas pengelolaan keuangan koperasi tidak hanya diukur dari seberapa baik dana dikelola, tetapi juga dari seberapa besar partisipasi dan pemahaman anggota dalam keseluruhan proses keuangan. Ini memperkuat pandangan bahwa transparansi

dan partisipasi publik adalah indikator utama keberhasilan pengelolaan keuangan lembaga ekonomi lokal seperti koperasi (Mardiasmo, 2002).

Untuk mencapai efektivitas maksimal, koperasi perlu mengembangkan sistem informasi keuangan yang lebih terbuka dan mudah dipahami. Penggunaan teknologi sederhana seperti aplikasi akuntansi berbasis mobile bisa menjadi solusi dalam memfasilitasi komunikasi dan pelaporan keuangan kepada anggota.

Aspek kepemimpinan koperasi juga sangat mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan. Kepemimpinan yang responsif dan akuntabel akan mendorong budaya organisasi yang lebih terbuka. Penelitian menunjukkan bahwa koperasi dengan kepemimpinan partisipatif cenderung memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan keuangannya (Haryono, 2020).

Kegiatan pengawasan internal hendaknya tidak hanya formalitas, tetapi menjadi bagian dari proses pengendalian kualitas manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh pengurus, pengawas, dan juga anggota koperasi harus didorong secara aktif. Model pengawasan partisipatif terbukti meningkatkan efisiensi organisasi sektor ekonomi rakyat.

Lebih lanjut, efektivitas pengelolaan keuangan akan berdampak langsung pada kesehatan keuangan koperasi, yang kemudian menjadi dasar dalam ekspansi layanan koperasi kepada masyarakat (Nurhayati & Fitriyani, 2021). Ketika pengelolaan keuangan tidak efektif, maka risiko keuangan seperti kerugian dan kebocoran dana akan menghambat fungsi koperasi dalam pemberdayaan ekonomi. Dalam konteks kebijakan lokal, efektivitas pengelolaan keuangan koperasi harus didukung oleh regulasi pemerintah desa maupun daerah yang memberi ruang dan bimbingan kepada koperasi. Kolaborasi antara Dinas Koperasi dan koperasi desa dapat menciptakan ekosistem yang sehat dalam pengelolaan keuangan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Terakhir, keterlibatan generasi muda dalam pengelolaan koperasi merupakan peluang besar untuk memperbarui sistem dan memperkuat efektivitas. Literasi digital dan akuntansi yang lebih tinggi di kalangan pemuda desa dapat dimanfaatkan untuk membangun koperasi yang lebih adaptif dan berdaya saing.

2.2. Dampak Pengelolaan Keuangan terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa merupakan proses penting yang bertujuan meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam mengelola sumber daya secara produktif. Dalam konteks koperasi, pengelolaan keuangan yang baik menjadi fondasi dalam menyediakan akses modal, pelatihan, dan program pemberdayaan yang berdampak nyata. Penelitian ini membuktikan bahwa koperasi dengan sistem keuangan yang efektif mampu menciptakan peluang ekonomi bagi anggotanya.

Sebagian besar responden menyatakan bahwa pendapatan mereka meningkat setelah bergabung dengan koperasi. Hal ini mendukung temuan Suparno pada tahun 2021 bahwa koperasi desa berperan dalam menciptakan sirkulasi ekonomi lokal melalui program simpan pinjam, usaha bersama, serta kegiatan pelatihan (Suparno, 2021). Dengan sistem keuangan

yang tertata, koperasi dapat memberikan pinjaman yang terjangkau dan tepat sasaran kepada anggotanya.

Ketersediaan dana dan transparansi dalam pengelolaan keuangan memungkinkan koperasi menyediakan pelatihan kewirausahaan secara rutin. Program pelatihan tersebut mencakup manajemen usaha mikro, perencanaan keuangan rumah tangga, dan pengembangan produk lokal. Hal ini sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Zimmerman, yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas individu untuk mengambil keputusan ekonomi yang mandiri (Zimmerman, 2000).

Selain peningkatan pendapatan, pemberdayaan ekonomi juga tercermin dari meningkatnya kemandirian anggota koperasi. Sebanyak 65% responden menyatakan mampu mengelola usaha sendiri setelah menerima pembiayaan dan pelatihan dari koperasi. Kemandirian ekonomi merupakan salah satu indikator utama dari pemberdayaan, sebagaimana dinyatakan oleh Sen dalam konsep "*capability approach*"—yaitu kebebasan individu dalam menentukan pilihan ekonomi secara aktif (Sen, 1999).

Koperasi juga mendorong partisipasi ekonomi masyarakat dalam kegiatan desa. Anggota koperasi secara aktif terlibat dalam bazar produk lokal, kelompok tani, dan kegiatan pengembangan UMKM. Partisipasi ini tidak hanya memperluas jejaring usaha, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan ekonomi di tingkat komunitas. Menurut Mulgan, keterlibatan kolektif dalam kegiatan ekonomi lokal merupakan bentuk nyata dari pemberdayaan berbasis komunitas (Mulgan et al., 2010).

Efek lain dari pengelolaan keuangan koperasi adalah terbukanya akses masyarakat desa terhadap modal produktif. Dalam sistem ekonomi formal, masyarakat desa sering kali kesulitan memperoleh kredit karena keterbatasan agunan dan literasi keuangan. Koperasi hadir sebagai solusi karena sistemnya berbasis kepercayaan dan partisipasi anggota. Hal ini memperkuat argumen dari Yunus, bahwa lembaga keuangan berbasis komunitas dapat mendorong transformasi ekonomi yang inklusif (Yunus, 2007).

Dari sisi sosial, pemberdayaan ekonomi melalui koperasi turut meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri masyarakat. Anggota merasa lebih dihargai karena diberi kesempatan mengelola usaha dan berkontribusi terhadap pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya bersifat material, tetapi juga psikologis dan sosial (Narayan, 2005). Pemberdayaan yang dimaksud juga memiliki dampak jangka panjang terhadap pengurangan ketergantungan pada bantuan pemerintah. Ketika masyarakat memiliki sumber penghidupan yang stabil dan berkelanjutan, mereka tidak lagi bergantung pada bantuan sosial atau program subsidi. Ini merupakan salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi berbasis masyarakat, yaitu menciptakan struktur ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.

Temuan dalam penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa koperasi desa yang menjalankan fungsi keuangannya secara efektif memiliki kontribusi yang signifikan dalam menekan angka pengangguran. Sebanyak 37% responden mengaku membuka usaha mikro

setelah mendapat bantuan dana dari koperasi. Hal ini berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru, baik secara langsung maupun tidak langsung, di lingkungan sekitar.

Namun demikian, pemberdayaan ekonomi yang dihasilkan dari koperasi belum merata pada semua anggota. Beberapa anggota masih kurang terlibat atau tidak aktif memanfaatkan program yang tersedia. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya literasi keuangan, keterbatasan waktu, atau kurangnya motivasi. Oleh karena itu, koperasi perlu menyesuaikan strategi pelatihan dan pendekatannya agar lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan anggota.

Untuk memperkuat dampak pemberdayaan ekonomi, koperasi perlu membangun kemitraan dengan pemerintah desa, perguruan tinggi, dan LSM. Kolaborasi ini penting untuk memperluas akses pasar, meningkatkan kualitas produk, serta menyediakan pendampingan usaha yang berkelanjutan. Seperti dikemukakan oleh World Bank, sinergi multipihak dalam pembangunan ekonomi lokal sangat penting untuk menciptakan perubahan yang signifikan (World Bank, 2005).

Kesimpulannya, pengelolaan keuangan koperasi yang efektif berperan besar dalam memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Efeknya tidak hanya terbatas pada peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup aspek kemandirian, partisipasi ekonomi, dan transformasi sosial. Dengan penguatan sistem keuangan internal dan pendekatan pemberdayaan yang adaptif, koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang tangguh dan inklusif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan koperasi yang efektif berperan penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Bogor. Efektivitas ini tercermin melalui beberapa aspek, antara lain: (1) sistem pencatatan keuangan yang transparan dan akuntabel, (2) manajemen keuangan yang partisipatif melibatkan anggota koperasi, serta (3) kemampuan koperasi dalam mengalokasikan dana untuk kegiatan produktif masyarakat. Ketiga aspek tersebut tidak hanya meningkatkan kepercayaan anggota, tetapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan dan kapasitas ekonomi rumah tangga desa.

Pengelolaan keuangan yang baik juga mendorong terbentuknya siklus ekonomi lokal yang sehat, memperkuat struktur kelembagaan koperasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha bersama. Dalam konteks pemberdayaan, koperasi telah menjadi wadah efektif untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan daya saing ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.

Saran

- 1) Bagi Pengelola Koperasi: Diharapkan untuk terus meningkatkan kapasitas dalam bidang akuntansi keuangan, pelaporan, dan manajemen risiko agar koperasi dapat lebih profesional dan dipercaya oleh anggotanya.
- 2) Bagi Pemerintah Daerah: Perlu adanya pelatihan dan pendampingan berkelanjutan untuk koperasi-koperasi di desa, khususnya dalam hal tata kelola keuangan dan pemanfaatan teknologi digital (misalnya aplikasi sistem keuangan koperasi).

- 3) Bagi Masyarakat Desa: Partisipasi aktif anggota koperasi harus terus didorong melalui pendidikan keuangan dan peningkatan kesadaran akan pentingnya koperasi sebagai sarana kemandirian ekonomi.
- 4) Bagi Peneliti Selanjutnya: Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif agar diperoleh pengukuran lebih objektif terkait kontribusi pengelolaan keuangan koperasi terhadap berbagai indikator ekonomi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., & Prasetyo, A. (2022). Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 37(1), 45–58. [https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JEBI.2022.37.1.45](https://doi.org/10.24843/JEBI.2022.37.1.45)
- Arifandy, F. P., Norsain, N., & Firmansyah, I. D. (2020). Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 3(1), 118. <https://doi.org/10.22219/jaa.v3i1.11665>
- Arifin, Z. (2020). Manajemen Keuangan Koperasi dan Dampaknya terhadap Kinerja Usaha Anggota. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 389–403. <https://doi.org/https://doi.org/10.18202/jamp.v11i3.860>
- Arifin, Z. (2021). Koperasi dan Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, 12(1), 77–84.
- Birchall, J. (2011). *People-Centred Businesses: Co-operatives, Mutuals and the Idea of Membership*. Palgrave Macmillan.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- De Silva, T., & Kodithuwakku, S. S. (2019). Community-based enterprises and economic empowerment: A Sri Lankan case. *Journal of Rural Studies*, 88, 66–74.
- Fitriani, H., & Yulianto, A. (2021). Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 25(2), 120–135. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jsp.2021.55829>
- Haryono, T. (2020). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Koperasi Terhadap Kesejahteraan Anggota. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 20(1), 34–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/x7jrh>
- Hasanah, L. (2020). Efektivitas Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Kelembagaan*, 11(1), 65–74.
- International Co-operative Alliance (ICA). (2017). *Co-operative Identity, Values & Principles*. <https://www.ica.coop>
- Jones, D., Kalmi, P., & Makinen, M. (2020). Organizational Effectiveness in Cooperatives. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 91(1), 587–610.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.
- Mersland, R., Nyarko, S. A., & Strom, R. O. (2019). Performance and governance in

- microfinance institutions. *Journal of Banking & Finance*, 100, 174–187.
- Mubyarto. (2018). *Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi*. BPFE.
- Mulgan, G., Tucker, S., Ali, R., & Sanders, B. (2010). Social innovation: What it is, why it matters and how it can be accelerated. *The Young Foundation*. <https://youngfoundation.org>
- Narayan, D. (2005). *Measuring Empowerment: Cross-Disciplinary Perspectives*. World Bank Publications.
- Nurhayati, R., & Fitriyani, A. (2021). Peran Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan dalam Meningkatkan Kinerja Koperasi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 34–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.18202/jamal.v12i3.4552>
- Permana, A., & Sari, P. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Koperasi terhadap Kepercayaan Anggota. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 7(2), 99–188. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/jakd.072.08>
- Purwanto, D. (2020). Kinerja Koperasi dan Partisipasi Anggota di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Dan Koperasi*, 15(1), 45–52.
- Rahman, A. (2021). Cultural-Based Economic Empowerment Models in Rural Communities. *International Journal of Social Economics*, 48(3), 369–385.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Setiadi, B. (2019). Indikator Efektivitas Organisasi Koperasi. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 7(2), 44–52.
- Situmorang, R. S., & Handayani, T. (2020). Peran Koperasi dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Literasi Keuangan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(1), 67–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jep.2020.18.1.67>
- Sudrajat, T. (2019). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi Pedesaan*, 14(2), 56–64.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabetika*.
- Suparno, D. (2021). Efektivitas Program Koperasi Unit Desa (KUD) dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, 5(3), 123–137. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jper.v5i3.1120>
- Supriyadi, H. (2021). Transparansi Laporan Keuangan dan Kinerja Koperasi. *Jurnal Koperasi Dan UMKM*, 17(2), 21–30.
- Syafrudin, M. (2021). Pengaruh Tata Kelola terhadap Efektivitas Koperasi. *Jurnal Akuntabilitas Sosial*, 15(2), 88–96.
- Tadesse, A., & Kebede, G. (2020). Financial Management Practices in Rural Saving and Credit Cooperatives in Ethiopia. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 10(1), 87–102.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (1992).
- Widodo, R. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 18(3), 12–19.

World Bank. (2005). *Localizing Development: Does Participation Work?*

Yunus, M. (2007). *Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism*. PublicAffairs.

Zimmerman, M. A. (2000). *Empowerment theory: Psychological, organizational and community levels of analysis*. In J. Rappaport & E. Seidman (Eds.) *Handbook of Community Psychology*. Springer.

